ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH PENDUDUK, INFLASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KARESIDENAN SEMARANG TAHUN 2016-2020

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

WAHYU TRI PURBANINGRUM
B300180015

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH PENDUDUK, INFLASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KARESIDENAN SEMARANG TAHUN 2016-2020

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

WAHYU TRI PURBANINGRUM
B300180015

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 13 Agustus 2022 oleh:

Dosen Pembimbing

Siti Fatimah Nurhayati, S.E., M.Si.
NIDN 0613046803

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH PENDUDUK, INFLASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KARESIDENAN SEMARANG TAHUN 2016-2020

Oleh:

WAHYU TRI PURBANINGRUM
B300180015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, 13 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Siti Fatimah Nurhayati, S.E., M.Si.** ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Yuni Prihadi Utomo, S.E., M.M** ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Didit Purnomo, S.E., M.Si.** ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si.
NIDN. 0616087401

PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Agustus 2022
Pembuat Pernyataan

WAHYU TRI PURBANINGRUM
B300180015

ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH PENDUDUK, INFLASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KARESIDENAN SEMARANG TAHUN 2016-2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Semarang tahun 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil uji pemilihan model membuktikan bahwa Fixed Effects Model (FEM) terpilih sebagai model terbaik. Hasil uji F membuktikan bahwa model yang dipakai eksis. Hasil analisis uji t menunjukkan produk domestik regional bruto dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,978778, artinya 97,87 persen variasi variabel pendapatan asli daerah dapat dijelakan oleh variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, inflasi dan pengeluaran pemerintah. Sisanya 2,13 persen dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak disertakan dalam model.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, produk domestik bruto, jumlah penduduk, inflasi, pengeluaran pemerintah, data panel

Abstract

This study aims to analyze the effect of regional gross domestic product, population, inflation and government spending on local revenue in the residency of Semarang in 2016-2020. The data used in this study is secondary data. The analytical method used in this study is panel data regression. The results of the model selection test prove that the Fixed Effects Model (FEM) was chosen as the best model. The F test results prove that the model used exists. The results of the analysis show that gross domestic product and regional inflation have a significant effect on local revenue, while population and government spending have no significant effect on local revenue. The coefficient of determination (R2) is 0.978778, meaning that 97.87 percent of the variation in the regional original income variable can be explained by the regional gross domestic product, population, inflation and government spending variables. The remaining 2.13 percent is explained by other independent variables that are not included in the model.

Keywords: development disparity, Sulawesi Island, Random Effect Model

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut (Kuncoro, 2004). Pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan berdasarkan ciri khas daerah yang bersangkutan dengan menggunakan sumber daya daerah masing-masing.

Pemerintah mengatur kebijakan pembangunan ekonomi melalui kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusun kembali pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna hasil penyelenggaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan melalui pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan indikator yang menjadikan daerah lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD menjadi sasaran utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Dibawah ini menyajikan data PAD daerah di wilayah karesidenan Semarang Tahun 2016-2020.

Tabel 1. PAD di Karesidenan Semarang Tahun 2016-2020 (Juta)

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Demak	287,457	309,612	342,324	407,400	439,694
Kab. Grobogan	299,211	440,456	315,743	344,559	350,453
Kab. Kendal	265,074	404,978	335,892	350,500	356,753
Kab. Semarang	318,536	417,417	383,475	429,011	442,528
Kota Salatiga	203,768	220,243	315,743	236,086	219,539
Kota Semarang	1,491,645	1,791,886	1,821,274	2,066,333	2,024,537

Sumber: DJPK dan berbagai terbitan

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa anggaran kabupaten atau kota karesidenan Semarang penerimaan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut terjadi hampir di setiap daerah, terutama di kota Salatiga. Dimana di kota Salatiga rata-rata angka PAD cenderung mengalami kenaikan namun kenaikannya terendah di antara kabupaten atau kota lainnya di karesidenan Semarang. Kota salatiga mengalami penurunan PAD di tahun 2019 sebesar 25.23% dan di tahun 2020 sebesar 7.01%, sehingga kenaikan PAD secara rata-rata dari tahun 2016-2020 hanya sebesar 4,8%. Hal ini mencerminkan bahwa kota Salatiga masih bergantung pada peran pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil.

Dibanding kota salatiga, kabupaten atau kota lainnya seperti Demak, Kendal, Grobogan, Semarang, dan kota Semarang dapat dikatakan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya dengan baik, dikarenakan penurunan yang terjadi di tahun-tahun tertentu tidak terlalu signifikan. Rata-rata kenaikan PAD tertinggi terjadi di kabupaten Demak yaitu sebesar 11,3% dan angka PAD selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

Menurut Purwaningsih (2011) penerimaan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan baru dan sumber pendapatan baru serta perubahan peraturan.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Ketika PDRB meningkat maka secara bersamaan akan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dari segi pembangunan. Meningkatnya kegiatan pembangunan daerah akan berpengaruh langsung terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan seseorang meningkat maka kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah meningkat pula. Semakin tinggi PDRB daerah secara langsung pajak dan atau retribusi daerah mengalami peningkatan pula, sehingga penerimaan PAD juga mengalami peningkatan (Prasetyawati, 2013).

Menurut Istanto (2011) penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penduduk merupakan unsur penting dari perencanaan pembangunan daerah dengan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Selain itu penduduk juga sebagai penggerak pembangunan, dimana penduduk menjadi salah satu target dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu analisa penduduk sangat mendukung efisiensi perencanaan pembangunan agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan (Purwaningsih, 2011) besarnya pendapatan dipengaruhi langsung oleh jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. Hal itu sesuai dengan kebijakan ekstensifikasi pula, semakin banyak penduduk yang wajib pajak atau retribusi maka penerimaan pajak daerah meningkat pula.

Aktivitas penduduk pada kegiatan perekonomian baik kegiatan produksi maupun konsumsi menyebabkan gejolak ekonomi secara menyeluruh atas permintaan barang dan jasa yang berlebihan dapat menyebabkan inflasi. Menurut BPS (2018), inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa yang

berlangsung secara terus-menerus. Kenaikan inflasi menyebabkan harga produksi atas barang dan jasa juga naik, sehingga perusahaan akan meningkatkan harga outputnya. Hal ini menyebabkan banyak penduduk yang tidak mampu membayar pajak dan retribusi sehingga peluang penerimaan pemerintah semakin kecil dan pendapatan asli daerah akan menurun (Novi Ariani dan Febriarianty, 2017).

Rahayu (2005) mengatakan, peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan pendukung, termasuk anggaran dan belanja agar terlaksananya pembangunan daerah. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur. Perbelanjaan tersebut dapat meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana pengaruh PDRB, jumlah penduduk, inflasi, serta pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Semarang pada tahun 2016-2020 dengan judul “Analisis pengaruh jumlah penduduk, inflasi, produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Semarang tahun 2016-2020”.

2. METODE

Guna menganalisis pengaruh inflasi, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD), penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section) yang memiliki keuntungan yaitu mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar (Widarjono, 2016). Persamaan model regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$LogPAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 logPDRB_{it} + \beta_2 logPOP_{it} + \beta_3 INF_{it} + \beta_4 logGOV_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:
PAD = Pendapatan asli daerah (rupiah/tahun)
PDRB = Produk domestik regional bruto (juta/tahun)
POP = Jumlah penduduk (jiwa/tahun)
INF = Inflasi (persen/tahun)
GOV = Pengeluaran pemerintah (rupiah/tahun)
log = Operator logaritma berbasis *e*
ε = Error term (faktor kesalahan)

Data yang akan di pakai dalam penelitian ini adalah data panel, yang merupakan pengamatan dari 6 Kabupaten/Kota di Karesidenan Semarang selama tahun 2016 s.d 2020, terhadap data Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah, yang diproksi dengan Pendapatan Asli Daerah. Data akan diperoleh dari Publikasi Biro Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Deskriptif

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan kain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuangan pemerintah daerah tercermin dari besaran pendapatan asli daerah yang dihasilkan dan bagaimana mengalokasikan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Data pendapatan asli daerah di karesidenan Semarang selama kurun waktu 2016-2020 diperlihatkan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa kota Semarang memiliki PAD tertinggi selama kurun waktu 2016-2020, di mana rata-rata pertahun 1.839.135.521.777 rupiah. Tingginya PAD di kota Semarang mencerminkan bahwa kota Semarang mampu memanfaatkan sumber daya (resources) yang dimiliki sehingga dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Selain itu, tingginya PAD di kota Semarang juga mencerminkan

bahwa kota tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan membuktikan bahwa kota Semarang mampu mengelola keuangan pemerintahan daerah secara mandiri.

Tabel 2. PAD di Karesidenan Semarang Tahun 2016-2020 (Juta)

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Demak	287,457	309,612	342,324	407,400	439,694
Kab. Grobogan	299,211	440,456	315,743	344,559	350,453
Kab. Kendal	265,074	404,978	335,892	350,500	356,753
Kab. Semarang	318,536	417,417	383,475	429,011	442,528
Kota Salatiga	203,768	220,243	315,743	236,086	219,539
Kota Semarang	1,491,645	1,791,886	1,821,274	2,066,333	2,024,537

Sumber: DJPK dan berbagai terbitan

Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa PAD terendah dimiliki oleh kota Salatiga, di mana rata-rata per tahun sebesar 239.076.297.565 rupiah. Rendahnya PAD kota Salatiga menandakan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki belum sepenuhnya terealisasi sehingga hasilnya belum bisa mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, kota Salatiga masih membutuhkan dana perimbangan dari pemerintah pusat agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tidak tertinggal dari kabupaten kota lainnya.

Produk domestik regional bruto adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk yang tinggal di suatu daerah, baik warga daerah maupun bukan warga daerah. Produk domestik regional bruto merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan setiap tahunnya berdasarkan

harga konstan. Data produk domestik regional bruto di karesidenan Semarang selama kurun waktu 2016-2020 diperhatikan pada Tabel 3.

Tabel 3. PDRB di Karesidenan Semarang Tahun 2016-2020 (Juta)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Demak	20,938	22,621	24,430	26,184	26,539
Kab. Grobogan	21,764	23,463	25,408	27,290	27,264
Kab. Kendal	33,797	36,520	39,546	42,535	42,581
Kab. Semarang	3,952	4,262	4,618	4,906	4,903
Kota Salatiga	1,053	1,138	1,233	1,331	1,326
Kota Semarang	14,704	16,029	17,542	19,154	18,925

Sumber: Badan pusat statistik, berbagai terbitan

Tabel 3 memperlihatkan kabupaten Kendal memiliki produk domestik regional bruto tertinggi, di mana rata-rata pertahunnya sebesar 38.996.379 juta rupiah. Tingginya produk domestik regional bruto di kabupaten Kendal mencerminkan bahwa barang dan jasa yang diproduksi penduduk nilainya tinggi dan cenderung meningkat selama kurun waktu 2016-2020. Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah penunjang pendamping provinsi Jawa Tengah, kabupaten Kendal memiliki keunggulan potensial yaitu pelabuhan niaga dan kawasan industri yang menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) dan jalur transportasi yang dilewati oleh trans jawa. Beberapa industri besar yang beroperasi di kabupaten Kendal antara lain Masterkidz Shop, PT. dae young textile, PT. kayu lapis indonesia, PT. rimba Partikel indonesia, PT. asia pacific fibers Tbk, dan evergen resources.

Penduduk adalah orang-orang yang berada di suatu daerah yang terikat aturan-aturan daerah tersebut dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain secara terus menerus. Penduduk di suatu daerah tidak sama kepadatannya dengan daerah yang lain. Biasanya untuk menghitung kepadatan penduduk di suatu wilayah adalah dengan membagi total penduduk dengan luas area di mana penduduk itu tinggal. Penduduk terdiri dari penduduk bukan usia kerja (berusia kurang dari 15 tahun) dan penduduk usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih).

Data jumlah penduduk di karesidenan Semarang selama kurun waktu tahun 2016-2020 diperlihatkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk di Karesidenan Semarang tahun 2016-22020 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Demak	1,129,298	1,140,675	1,151,796	1,162,805	1,203,956
Kab. Grobogan	1,358,404	1,365,207	1,371,610	1,377,788	1,453,526
Kab. Kendal	949,682	957,024	964,106	971,086	1,018,505
Kab. Semarang	1,014,198	1,027,489	1,040,629	1,053,786	1,053,094
Kota Salatiga	186,420	188,928	191,571	194,084	192,322
Kota Semarang	1,729,083	1,757,686	1,786,114	1,814,110	1,653,524

Sumber: Badan pusat statistik, berbagai terbitan

Tabel 4 memperlihatkan jumlah penduduk di karesidenan Semarang mengalami fluktuasi pada periode 2016 hingga 2020. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk tertinggi di karesidenan Semarang adalah kota Semarang, dengan rata-rata per tahunnya sebesar 1.748.103 jiwa. Tingginya jumlah penduduk di kota Semarang mencerminkan bahwa pemerintahan daerah memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan rata-rata jumlah penduduk terendah di karesidenan Semarang adalah kota Salatiga dengan angka 190.665 jiwa. Rendahnya jumlah penduduk di kota Salatiga disebabkan oleh faktor pertumbuhan alami maupun pertumbuhan non alami. Faktor pertumbuhan alami di kota salatiga yaitu angka kematian yang tinggi dari tahun 2019 hingga 2020 sebesar 1.873 jiwa, pemerintah daerah kurang memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang terutama di bidang kesehatan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi terjadi karena dua faktor yaitu demand pull inflation atau inflasi terjadi karena kenaikan permintaan dan cost pull inflation atau inflasi terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Data inflasi di karesidenan Semarang selama kurun waktu 2016 hingga 2020 diperlihatkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Inflasi di Karesidenan Semarang tahun 2016-2020 (persen)

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Demak	2.27	3.57	2.73	2.85	1.62
Kab. Grobogan	2.41	4.05	2.89	2.82	1.81
Kab. Kendal	2.47	3.60	2.16	2.58	1.67
Kab. Semarang	2.39	3.67	2.80	2.93	1.9
Kota Salatiga	2.19	3.50	2.47	2.53	1.24
Kota Semarang	2.32	3.64	2.76	2.93	1.49

Sumber: Badan pusat statistik, berbagai terbitan

Tabel 5 memperlihatkan bahwa inflasi tertinggi di karesidenan Semarang adalah kabupaten Grobogan, dengan rata-rata inflasi sebesar 2,79 persen. Meski masih dalam kategori inflasi ringan, namun kenaikan inflasi di setiap tahunnya tentu menyebabkan pendapatan masyarakat secara riil menjadi lebih kecil, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa akan menurun. Bagi produsen, kenaikan inflasi akan berdampak pada kenaikan biaya produksi perusahaan, terutama biaya bahan baku sehingga proses produksi akan terhambat. Di sisi lain, kenaikan inflasi menyebabkan konsumen sulit memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan tujuan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran tersebut mudah dilakukan. Disisi lain anggaran juga menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mendanai pembangunan daerah dalam kegiatan pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Data pengeluaran pemerintah selama kurun waktu tahun 2016-2020 diperlihatkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengeluaran Pemerintah di Karesidenan Semarang tahun 2016-2020 (Juta)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Demak	2,056	1,666	2,050	2,310	2,285
Kab. Grobogan	2,331	2,553	2,346	2,514	2,511
Kab. Kendal	3,047	4,184	2,185	2,449	1,035
Kab. Semarang	1,974	2,034	7,461	8,094	10,640
Kota Salatiga	9,197	8,495	9,235	9,427	10,368
Kota Semarang	39,318	43,289	45,064	53,073	41,289

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai terbitan

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan tujuan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran tersebut mudah dilakukan. Disisi lain anggaran juga menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mendanai pembangunan daerah dalam kegiatan pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Data pengeluaran pemerintah selama kurun waktu tahun 2016-2020 diperlihatkan pada Tabel 6.

Tabel 6 memperlihatkan pengeluaran pemerintah di karesidenan semarang mengalami fluktuasi. Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di karesidenan Semarang tertinggi adalah kota Semarang, dengan rata-rata 44298125457 rupiah. Tinggi jumlah penduduk di karesidenan Semarang menunjukkan adanya pembangunan daerah yang semakin melesat agar daerah memiliki fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian. Sedangkan rata-rata terendah adalah kabupaten Demak dengan angka 2073550851 rupiah. Rendahnya pengeluaran pemerintah kabupaten Demak menggambarkan bahwa pemerintahan daerah kabupaten Demak kurang memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat agar tidak tertinggal dengan kabupaten/kota lainnya.

3.2 Hasil Estimasi Data Panel

Guna menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, Inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah, diestimasi dengan analisis Regresi Data Panel, yang formulasi model ekonometrik atau model estimatornya adalah sebagai berikut:

$$logPAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 logPDRB_{it} + \beta_2 logPOP_{it} + \beta_3 INF_{it} + \beta_4 logGOV_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:
PAD = Pendapatan asli daerah (rupiah/tahun)
PDRB = Produk domestik regional bruto (juta/tahun)
POP = Jumlah penduduk (jiwa/tahun)
INF = Inflasi (persen/tahun)
GOV = Pengeluaran pemerintah (rupiah/tahun)
log = Operator logaritma berbasis *e*
ε = Error term (faktor kesalahan)
β_0 = Konstanta
$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4$ = Koefisiensi regresi variabel independen
i = Observasi ke *i*
t = tahun ke *t* (2016-2020)

Hasil estimasi model ekonometrika dengan pendekatan PLS, FEM dan REM beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross Section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	8,711567	5,946881	9,159677
LOG(PDRB)	0,083109	1,030731	0,068429
LOG(POP)	0,452820	0,225480	0,472313
INF	0,019476	0,072253	0,021094
LOG(GOV)	0,468038	0,037091	0,446560
R-squared	0,913916	0,978778	0,881757
Adjusted R-squared	0,900142	0,969228	0,862838
F-Statistic	66,35340	102,4905	46,60704
Prob F-Statistic	0,000000	0,000000	0,000000

Uji Pemilihan Model
(1) Chow
Cross-section F(6,30) = 12,225379; Prob. F(6,30) = 0,0000
(2) Hausman
Cross-section x^2(4) = 55,666915; Prob. x^2(4) = 0,0000

Sumber: Badan pusat statistik, diolah

3.3 Uji Chow

Uji Chow dipakai untuk memilih model terestimasi Pooled Least Square (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM). H0 uji Chow: model terestimasi adalah Pooled Least Square (PLS), dan HA-nya: model terestimasi adalah Fixed Effect Model (FEM). H0 diterima jika nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F > α; H0 ditolak bila nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F ≤ αjika nilai F- statistik > α;

Dari Tabel 7, terlihat nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F sebesar 0,0000 (< 0,01), jadi H0 ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah Fixed Effect Model (FEM).

3.4 Uji Hausman

Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi Fixed Effects Model (FEM) atau Random Effects Model (REM). H0 uji Hausman: model terestimasi adalah Random Effects Model (REM) dan HA-nya: model terestimasi adalah Fixed Effects Model (FEM). H0 diterima jika nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ2 hitung > α; H0 ditolak bila nilai probabilitas χ2 hitung ≤ α.

Berdasarkan Tabel 7, terlihat nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ2 sebesar 0,0000 (> 0,01), jadi H0 ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah model Fixed Effects Model (FEM).

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman di muka, model Fixed Effects Model (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model Fixed Effects Model (FEM) tersaji pada Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 8. Model Estimasi Fixed Effects Model (FEM)

$\widehat{LogPAD}_{it}$ = 5,946881 + 1,030731 $LogPDRB_{it}$ + 0,225480 $LogPOP_{it}$
(0,0046)* (0,8521)
+ 0,072253INF_{it} + 0,037091$LogGOV_{it}$
(0,0497)** (0,5648)
R^2 = 0,978778; *DW* = 2,590999; *F* = 102,4905; Prob. *F* = 0,0000

Sumber: Lampiran 1.

Keterangan:
* = Signifikan pada α = 0,01;
**Signifikan pada α = 0,05;
*** Signifikan pada α = 0,10;
Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Tabel 9. Konstanta Fixed Effects Model (FEM)

	Wilayah	Effect	Konstanta
1	Kab. Demak	-1,007810	4,939071
2	Kab. Grobogan	-1,122502	4,824379
3	Kab. Kendal	-1,497484	4,449397
4	Kab. Semarang	0,815025	6,761906
5	Kota Salatiga	2,037381	7,984262
6	Kota Semarang	0,775389	6,722270

Sumber: Pengolahan data

3.5 Uji Eksistensi Model Terestimasi FEM

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai nol). Uji eksistensi model adalah uji F. Karena variabel independen dalam model ekonometrik ada empat, maka formulasi hipotesisnya: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (koefisien regresi semua nol atau model tidak eksis); $H_A: \beta_1 \neq 0 \vee \beta_2 \neq 0 \vee \beta_3 \neq 0 \vee \beta_4 \neq 0$ (setidaknya satu koefisien regresi tidak sama dengan nol atau model eksis). H0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F > α; H0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F ≤ α.

Dari Tabel 8, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F bernilai 0,0000 (< 0,01); jadi H0 ditolak. Simpulan, model terestimasi Fixed Effects Model (FEM) eksis.

3.6 Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi FEM

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh memakai uji *t*. H_0 uji *t* $\beta_i = 0$: variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; H_A-nya $\beta_i \neq 0$: variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H_0 akan diterima jika nilai *p* (*p value*), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $t > \alpha$; H_0 akan ditolak jika nilai *p* (*p value*), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $t \leq \alpha$. Hasil uji validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	t	Sig. t	Kriteria	Kesimpulan
Log (PDRB)	3,188365	0,0046	< 0,01	Signifikan pada α = 0,01
Log (POP)	0,188836	0,8521	> 0,10	Tidak berpengaruh
INF	2.088963	0,0497	< 0,05	Signifikan pada α = 0,05
Log (GOV)	0,585437	0,5648	> 0,10	Tidak berpengaruh

Sumber: Lampiran 1, diolah.

3.7 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 10, terlihat variabel independen, yakni variabel produk domestik regional bruto (PDRB) dan inflasi (INF), memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan variabel Jumlah penduduk (POP) dan variabel pengeluaran pemerintah (GOV), tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Variabel produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki koefisien regresi sebesar 1,030731, dengan pola hubungan logaritma-logaritma. Artinya, apabila variabel produk domestik regional bruto meningkat 1 persen, maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 1,030731 persen. Sebaliknya, jika variabel produk domestik regional bruto turun 1 persen, maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 1,030731 persen.

Variabel Inflasi (INF) memiliki koefisien regresi sebesar 0,072253, dengan pola hubungan logaritma-linier. Artinya, apabila inflasi naik 1 persen,

maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,072253X100 = 7,2253 persen. Sebaliknya, jika inflasi turun 1 persen, maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 7,2253 persen.

Nilai konstanta masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 4.8. Nilai konstanta tertinggi dimiliki Kabupaten Salatiga, yaitu sebesar 7,984262. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah, di Karesidenan Semarang, Kota Salatiga memiliki pendapatan asli daerah tertinggi selama kurun waktu 2016-2020. Sementara nilai konstanta terendah dimiliki Kabupaten Kendal, yaitu sebesar 4,4499397. Terkait dengan pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, Inflasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah, Kabupaten Kendal cenderung memiliki pendapatan asli daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya pada kurun waktu 2016-2020.

3.8 Interpretasi Ekonomi

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen secara parsial, dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. H_0 uji t adalah $\beta_i = 0$ (i = 1, 2, 3,) atau pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan populasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap disparitas pembangunan. Sementara itu, hipotesis alternatif (H_A) menyatakan bahwa $\beta_1 < 0$ atau pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap disparitas pembangunan, $\beta_2 > 0$ atau indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap disparitas pembangunan, dan $\beta_3 > 0$ atau populasi berpengaruh positif terhadap disparitas pembangunan. H_0 tidak ditolak apabila probabilitas nilai t-statistik > α dan H_0 ditolak apabila probabilitas nilai t-statistik < α. Hasil Uji t terangkum pada Tabel 5.

Pendapatan asli daerah di berbagai kabupaten dan kota di karesidenan Semarang selama periode tahun 2016-2020, dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto dan inflasi, sementara jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Semarang. Selisih pendapatan antar kabupaten dapat diatasi dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Potensi yang dimiliki setiap kabupaten/kota dapat dilihat melalui kondisi sektoral ekonomi daerah seperti sektor industri, sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor-sektor lainnya. Selain sektor ekonomi daerah, tingkat pendapatan masyarakat yang besar akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, sehingga dapat membantu dalam penerimaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hijri (2018), di mana produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Simeulue selama kurun waktu 2007-2016 dengan signifikansi empirik (ρ) t 0.0094 (< 0.05). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Juwita dan Widia (2022), di mana produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatra Barat selama kurun waktu 2018-2019. Menurutnya, nilai koefisien variabel produk domestik regional bruto hanya berpengaruh sebesar 6,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hal tersebut dikarenakan produk domestik regional bruto mengalami penurunan secara drastis di kabupaten kota provinsi Sumatera Utara.

Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Semarang. Pemekaran wilayah menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah penduduk, penduduk yang termasuk wajib pajak sebelum terjadinya pemekaran masuk ke dalam kabupaten/kota dan setelah terjadi pemekaran jumlah wajib pajak tersebut telah berpindah ke kabupaten/kota lainnya yang secara otomatis akan mengurangi pendapatan asli daerah, seperti kabupaten Demak yang memiliki jumlah penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Kendal yang jumlah penduduknya masih dibawah kabupaten/kota lainnya. Kemudian, dengan berkurangnnya jumlah penduduk di karesidenan semarang akan mengurangi jumlah konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga pajak pembelian atau PPN juga akan berkurang. Hal

ini menyebabkan rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah karesidenan Semarang.

Hasil penelitian ini sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hijri (2018), di mana jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Simeulue selama kurun waktu 2007-2016 dengan signifikansi empirik (ρ) t sebeesar 0.3971 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Maskie (2014), dimana jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di kota Malang selama kurun waktu 1998-2012. Menurutnya, ketika jumlah penduduk meningkat akan meningkatkan pola konsumsi barang dan jasa yang kemudian akan mengarah peningkatan pajak atau retribusi. Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk pendatang di kota Malang untuk aktivitas kuliah, sehingga mahasiswa memerlukan biaya hidup untuk kuliah maka peredaran uang untuk kegiatan produksi barang dan jasa secara langsung akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi.

Inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Semarang selama kurun waktu 2016-2020. Pengaruh inflasi terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Semarang disebabkan karena pendapatan masyarakat yang mengalami peningkatan sehingga terdapat penyesuaian terhadap barang dan jasa yang berlaku di masyarakat. Harga barang dan jasa yang naik dapat mempengaruhi penerimaan PPN atau retribusi yang akan diterima pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat semakin tinggi pula tingkat konsumsi masyarakat, sehingga ketika masyarakat lebih banyak mengonsumsi barang dan jasa maka secara otomatis akan mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini sama halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Indra Randy Weley et al (2017), di mana inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Manado. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan inflasi memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah yang disebabkan oleh meningkatnya nilai barang dan jasa yang memberikan

kontribusi pajak dan retribusi terhadap penerimaan daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Aris Adi Prasetyo et al (2022), di mana inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Menurutnya variabel inflasi dapat menurunkan tingkat konsumsi barang dan jasa sebagai respon atas perubahan harga yang kena pajak dan retribusi daerah.

Pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah di karesidenan Semarang. Hal ini dikarenakan di dalam anggaran belanja daerah (APBD) terbagi dalam berbagai program baik pembangunan maupun program sosial lain yang lebih mengoptimalkan perekonomian. Pengeluaran pemerintah di karesidenan Semarang terutama di kota Semarang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Semarang yang biaya pengeluarannya lebih sedikit. Pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari kebijakan publik, maka sudah semestinya jika pengeluaran pemerintah digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan daerah kabupaten/kota karesidenan Semarang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena pembangunan tersebut membutuhkan waktu baik masyarakat umum maupun pelaku usaha untuk merasakan keefektifan dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima dan berpengaruh terhadap pajak dan retribusi yang diserap pemerintah serta pengeluaran pemerintah dapat diambil dari penerimaan daerah yang berarti secara langsung ketika terjadi pengeluaran pemerintah atau program pemerintah sedang berjalan otomatis akan menurunkan PAD, oleh sebab itu hubungan antara pengeluaran pemerintah dan PAD adalah tidak berpengaruh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Supriadi (2016), di mana hasil regresi yang dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah belum di rasakan manfaatnya. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Aris Adi Prasetyo et all (2022), di mana pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Menurutnya pengeluaran pemerintah digunakan untuk

mengoptimalkan infrastruktur dan investasi. Dengan keberadaan infrastruktur yang memadai dapat mendukung aktivitas ekonomi di kabupaten/kota.

Konstanta antarwilayah menunjukkan perbedaan yang mencolok. Dalam kaitannya dengan pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk (POP), Inflasi (INF) dan pengeluaran pemerinta (GOV), kabupaten Demak, Grobogan dan Kendal cenderung memiliki tingkat pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih rendah dibandingkan kabupaten Semarang, kota Salatiga dan kota Semarang. Tiga daerah terakhir, terutama kota Salatiga merupakan wilayah yang paling baik dalam melakukan mobilisasi pendapatan asli daerah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengujian pemilihan model terbaik menggunakan Uji Chow diketahui bahwa model yang terbaik adalah Fixed Effects Model (FEM). Kemudian pada Uji Hausman model yang terbaik adalah Fixed Effects Model (FEM). Sehingga estimasi model yang paling tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effects Model (FEM).
b. Hasil uji signifikansi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa model terpilih adalah Fixed Effects Model (FEM) eksis pada tingkat α sebesar 0,01 atau satu persen.
c. FEM sebagai model terbaik, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis uji t diketahui variabel produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada tingkat α = 0,01. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada tingkat α = 0,10. Variabel inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada tingkat α = 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada tingkat α = 0,10.

d. Hasil kebaikan model pada model terestimasi FEM menunjukkan nilai koefisiensi determinasi (R^2) sebesar 0,978778. Artinya 97,87% variasi perubahan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh perubahan produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, inflasi dan pengeluaran pemerintah. Sisanya 2,13% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain yang tidak disertakan dalam model.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

a. Bagi pemerintah daerah masing-masing kabupaten kota di karesidenan Semarang hendaknya lebih memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.
b. Bagi dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pelaporan secara efisien dan efektif. Selain itu, dengan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat akan menimbulkan keteraturan pembayaran retribusi sehingga menambah penerimaan daerah.
c. Dinas kependudukan dan catatan sipil diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan agar kuantitas retribusi jasa umum akta catatan sipil meningkat sehingga dapat menambah penerimaan pendapatan asli daerah.
d. Bagi Bank Indonesia diharapkan mampu mengendalikan inflasi agar dapat mendorong kegiatan ekonomi, khususnya bagi para pelaku bisnis dan pembangunan daerah. Selain itu, inflasi yang terkendali membuat harga komoditas lebih terjangkau sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Admaja, A. E. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Semarang.* Jurnal: Universitas Negeri Semarang.

Aris Adi Prasetyo, V. N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. https://ejournal.uksw.edu/dekat/article/view/4799. *Jurnal DEKAT: Dinamika Ekonomi Rakyat*, Vol 1 NO 1. 37-56. ISSN:.

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Edisi kelima.* Yogyakarta: UPP STIM YKPM.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Indonesia 2018.

——————————. 2017-2021. Statistik Kabupaten Demak 2017-2021.

——————————. 2017-2021. Statistik Kabupaten Grobogan 2017-2021.

——————————. 2017-2021. Statistik Kabupaten Kendal 2017-2021.

——————————. 2017-2021. Statistik Kabupaten Semarang 2017-2021.

——————————. 2017-2021. Statistik Kota Salatiga 2017-2021.

——————————. 2017-2021. Statistik Kota Semarang 2017-2021.

DJPK. 2016. Realisasi APBD. APBD-2016_ringkasan.xlsx (live.com). diakses tanggal 23 Januari 2022

DJPK. 2017. Realisasi APBD. APBD-2017_ringkasan_per-April-2017_uploadweb.xlsx (live.com). diakses tanggal 23 Januari 2023

DJPK. 2018. Realisasi APBD. APBD2018_10092020-Website.xlsx (live.com). diakses tanggal 23 Januari 2022

DJPK. 2019. Realisasi APBD. APBD2019_10092020-Website.xlsx (live.com). diakses tanggal 23 Januari 2022

DJPK. 2020. Realisasi APBD. APBD-2020_per8Juli2020_value.xlsx (live.com). diakses tanggal 23 Januari 2022

Bartle John R., C. A. (2011). "Beyond the Property Tax: Local Government Revenue Diversification". *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.*, 23 (2): 268-287.

Castro, G. A. (2014). "Determinants of TAx Revenue in OECD COuntries Over The Periode 2001-2011". *Contaduría y Administración*, 59 (3):35-59.

Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409*, Vol 5 No 2, ISSN: 2356-2269.

Elita. (2007). *Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.* Rajawali: Jakarta.

Evi Adriani, S. I. (2008). PENGARUH PDRB DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MERANGIN. Doi: http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v8i2.241. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 8 No 2.

Fiqih, A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2004-2008.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2010.

Halim, J. A. (2004). Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. http://114.5.90.38/ejournal/index.php/RDOS/article/view/612. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 7 No 2. ISSN: 1411-5794.

Hendriyani, N. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: DPPKAD, BAPPEDA dan BPS Kabupaten Tahun 2006-2015).* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Indra Randy Wesley, A. G. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. https://doi.org/10.35794/jpekd.16457.19.3.2017*, Vol 18 No 16. ISSN: 2685-3183.

Istianto, D. D. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2009. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.

Khadijah, S. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi yogyakarta Tahun 2011-2015.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi dan peluang.* Jakarta: Erlangga.

Nurrohman, Y. K. (2014). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.* Jember: Universitas Jember.

Larasati, O. P. (2018). *Analisis Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Padang Panjang.* Padang, Sumatra Barat: Thesis: Universitas Andalas.

Maskie, I. S. (2014). "Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol 2 No 2.

Murib, D. (2018). "PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDAPATAN PERKAPITA, PDRB TERHADAP PAD DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi: GARUDA*, Vol 18. No 01. Publish: 5 Juni 2018.

Nabila, L. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Nasir, M. S. (2019). ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADE OTONOMI DAERAH. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, DOI:https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45*, Vol 2 No 1. 30-45. P-ISSN: 2089-2489.

Prasetyawati, L. G. (2013). Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990-2011.

Rahayu, S. d. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP),http://eprints.undip.ac.id/16857/1/Analisis_Pendapatan_Asli_Daerah_(_PAD_)_Dan_Faktor-Faktor....by_Purbsyu_Budi_Ssntoso_%26_Retno_Puji_Rahayu_(OK).pdf* Vol 2 No 1'. pp. 9-8. ISSN: 1829-7617.

Sofi, I. (2020). Analisis Kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik, https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.984*, Vol. 4 No. 2.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D.* Edisi 1. Bandung: Alfabeta.

Sulkadria, H. J. (2018). Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 01 No 2*, https://ojs.unimal.ac.id/ekonomi_regional/article/view/1097.

Supriadi, A. (2016). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Terhadap PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 205-2014". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 6 No 2. ISSN: 2301-8828.

Thesaurianto, K. (2007). *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Widanta, G. B. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Berpenagruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal EP Unud, 3 [5] : 201-208, https://www.neliti.com/id/publications/44451/analisis-faktor-faktor-yang-berpengaruh-terhadap-pendapatan-asli-daerah-pad-kota*, ISSN: 2303-0178.

Widia, R. J. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Land Journal, https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1750*, Vol 3 No. 1. p-ISSN: 2715-9590.

Yalaman, G. O. (2019). "Financial Inclusion and Tax Revenue. *Central Bank Review*, 19 (3): 107-113.

Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Edisi Revisi. Depok: Raja Grafindo Persada.